



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke –
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 31 Januari 2013
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 11.20 Wib s.d 18.50 Wib.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: Pembahasan sinkronisasi dan koordinasi Program Penanggulangan Banjir DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang bersumber dari APBN dan APBD.
Ketua Rapat	: Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat diwakili Plt Sekda Jawa Barat, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 11.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala BNPB pada hari ini adalah pembahasan sinkronisasi dan koordinasi Program Penanggulangan Banjir DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang bersumber dari APBN dan APBD.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala BNPB untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi V DPR RI mengapresiasi tanggap darurat yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, Basarnas, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten dan Pemprov Jawa Barat terhadap penanggulangan kondisi darurat banjir yang terjadi. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, Basarnas, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten dan Pemprov Jawa Barat untuk meningkatkan manajemen dan koordinasi penanggulangan bencana banjir.
2. Komisi V DPR RI memahami dan mendukung usulan anggaran tambahan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 2.037,2 Miliar untuk program/kegiatan penanggulangan banjir dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur berupa terowongan/*tunnel* sepanjang 2,1 km, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 545,0 Miliar (TA. 2013 – 2014);
 - b. Normalisasi Kali Ciliwung dimulai dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Jembatan TB. Simatupang sepanjang 19 km, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 1.287,5 Miliar (TA. 2013 – 2016);
 - c. Pembangunan prasarana drainase di DKI Jakarta, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 90,0 Miliar (TA. 2013); dan
 - d. Pengadaan peralatan tanggap darurat, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 114,7 Miliar (TA. 2013).

Selanjutnya, Komisi V DPR RI menyetujui kebutuhan mendesak sebesar Rp. 646,7 Miliar pada Tahun Anggaran 2013, sesuai lampiran rincian yang disampaikan dalam Surat Menteri Pekerjaan Umum No. KU 01.01-Mn/53 tanggal 23 Januari 2013.

3. Komisi V DPR RI menegaskan kepada Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Banten dan Pemprov. Jawa Barat beserta Kabupaten/Kota terkait, untuk menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur sebagai acuan bagi pembangunan dan pengembangan di wilayah tersebut dan melakukan penegakan hukum pada setiap alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan RTRW.
4. Komisi V DPR RI meminta Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Banten dan Pemprov. Jawa Barat untuk menyampaikan data akurat tentang perubahan alih fungsi lahan di masing-masing provinsi sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan air.
5. Komisi V DPR RI mendukung upaya Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten dan Pemprov Jawa Barat dalam program pengendalian banjir secara struktural maupun non struktural antara lain peningkatan peran serta masyarakat dalam pembuatan sumur resapan dan/atau biopori pada setiap bangunan rumah dan gedung.

6. Komisi V DPR RI...../Hal 3.

6. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten dan Pemprov Jawa Barat untuk melakukan sinkronisasi program bersama pengendalian banjir Jabodetabekpunjur dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN & APBD.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.50 WIB.

Jakarta, 31 Januari 2013

KETUA RAPAT,

TTD

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

TTD

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

GUBERNUR DKI JAKARTA,

TTD

JOKO WIDODO

**KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,**

TTD

SYAMSUL MAARIF

GUBERNUR BANTEN,

TTD

Hj. RATU ATUT CHOSIYAH

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

TTD

DJOKO KIRMANTO

Pit. SEKDA JAWA BARAT,

TTD

PERY SOEPARMAN